

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana integritas pemilu sebagai harga yang tidak dapat dinegosiasikan, meskipun praktik pemilu dibanyak negara, termasuk di indonesia, masih terdapat berbagai kejanggalan dalam menjaga integritas pemilu. Pasalnya, masih banyak partai penguasa ingin bertahan kekuasaan ada ditangannya, disisi lain banyak calon penguasa baru yang berharap kekuasaan bisa berpindah ketangan mereka dengan cepat, dan sesegera mungkin. Kedua faktor ini sering kali membuat integritas pemilu yang memegang pada prinsip “hak pilih universal” dan kesetaraan politik” di mana pemilu yang etis, professional, tidak memihak, adil, serta transparan menjadi porak poranda yang tereliminasi di tangan segelintir elite dan penguasa tiran. Sehebat apapun negara yang memegang teguh hukum dan tatanan konstitusional yang dibuat, tetap saja runtuh di tangan rezim otokrasi-populis dan penguasa tiran (Ziblatt, 2019).

Menurut Harris Soche dalam Setiadi (2022), demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, diri, dan orang banyak yang merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang diberikan untuk memerintah, seperti pengertian

yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) masih menjadi peristiwa pesta demokrasi di Indonesia. Perayaan pesta demokrasi tersebut menjadi acara tahunan ke tahunan yang dilakukan oleh kandidat pemilu. Kegiatan kampanye merupakan sebuah usaha untuk menerima suatu gagasan atau ide dari kandidat tersebut. Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari agama, gender, suku, budaya, adat istiadat dan antar kelompok, hal ini juga dapat dilihat pada partai politik yang ikut serta dalam pemilu, dengan beragam identitas agama, gender, suku, budaya, adat istiadat dan antar kelompok seringkali dijadikan sebagai alat politik.

Hampir semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, melaksanakan pemilu parlemen maupun pemilu presiden sebagai tradisi penting bagi demokrasi. Masalahnya, tidak semua pemilu berjalan konsisten sesuai mengikuti demokrasi dengan benar. jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Di AS, menurut Ziblatt (2019) pemilu tahun 2016 merupakan pemilu terburuk sepanjang catatan sejarah demokrasi AS, yang di mana pemilu tersebut dimenangkan oleh Donald Trump dari partai republik dan menyingkirkan Hillary Clinton serta partai demokrat, sehingga saat ini masih menyisakan pertanyaan besar.

Manipulasi pemilihan umum terjadi dalam proses pencalonan, terutama untuk menghambat calon pesaing terkuat. Modus seperti ini biasanya akan

diikuti oleh korupsi politik rezim untuk akumulasi dana bagi calon yang direstui, Sing dalam Mudjiyanto *et al* (2024). Faktor lain adalah rendahnya literasi politik, parokialisme budaya politik, sosialisasi pemilihan umum yang tidak merata, dan policy teknis, seperti desain surat suara yang rumit untuk mengaburkan fokus calon legislatif pada pilihan *voters* dan hasil pemilihan umum (Hill *et al.*, 2017).

Politik sering dijadikan untuk adu domba, politik sgregasi, politik fragmentasi, politik okupasi, dan privatisasi politik juga menjadi ancaman untuk demokrasi yang dilakukan oleh rezim populis diruang kontestasi pemilu. Ada beberapa data yang menyebut bahwa para pemain politik, elite birokrasi, dan penyelenggara pemilu di beberapa negara demokrasi, termasuk Indonesia, dengan sengaja memainkan strategi politik polarisasi ideologis, amplifikasi isu SARA, pembelokan opini publik, atau membuat penggiringan preferensi pemilih pada kandidat atau pasangan calon tertentu dalam banyak kasus yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terang-terangan (Chambers, 2023).

Komunikasi massa adalah salah satu media untuk berkomunikasi, dalam keunggulannya mempunyai informasi yang begitu luas. Banyak definisi tentang komunikasi massa yang dikemukakan oleh parah ahli komunikasi. Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Komunikasi massa adalah informasi yang disampaikan kepada khalayak luas dengan melalui media massa. Media masa dapat berupa media

elektronik seperti televisi dan radio, maupun media cetak seperti majalah atau surat kabar, serta film (Romli, 2017).

Pada ilmu komunikasi terdapat beberapa model didalamnya, seperti model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Jika dilihat dari ilmu komunikasi ini terjadi suatu isu sosial, seperti kritik sosial yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya terhadap permasalahan yang terjadi dilikungan masyarakat (Efendi *et al.*, 2023).

Kritik termasuk suatu masalah analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki suatu pekerjaan atau aktivitas, dan kritik sosial dapat diartikan sebagai ironi atau sindiran terhadap suatu konfrontasi dengan realitas yang tidak adanya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat. Kritik sosial mengemukakan saat-saat di mana kehidupan dipandang tidak harmonis serta saat masalah-masalah sosial mengakibatkan dampak-dampak negatif dalam kehidupan masyarakat.

Kritik sosial masih menjadi sebuah inovasi sosial, yang menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat dengan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dari gagasan lama ke gagasan baru dari masyarakat. Struktur dari kritik

sosial berfungsi untuk membongkar bermacam sikap konservatif, status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk tujuan perubahan sosial. Kritik sosial muncul ketika masyarakat, beberapa orang atau golongan masyarakat tertentu yang ingin menciptakan hal yang baru, hal yang lebih baik dan maju, atau secara politik yang lebih demokratis dan transparan.

Pasca reformasi di Indonesia, pemilihan umum dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 hingga pemilihan umum 2024 hanya pemilu B.J Habibie ke megawati soekarnoputri dan pemilu langsung 2004 transisi era megawati soekarno putri ke soesilo Bambang yudoyhono dianggap berjalan sesuai demokratis dibanding pemilihan umum setelahnya, apalagi dibandingkan dengan pemilihan umum era orde baru (Jannah, 2023)

Pasca era Habibie dan megawati ancaman yang paling nyata karena minimnya integritas penyelenggara pemilihan umum dan menguatnya karakter rezim otokrasi populis yang sesungguhnya yaitu produk dari pemilihan umum demokratis. Kenyataan ini memberikan dampak yang serius pada rapuhnya legitimasi politik rezim populis, dan lemahnya kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi, sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai politik dan parlemen, dan membuat banyaknya jumlah golput dalam setiap pemilihan umum dari tahun ke tahun.

Seiring berkembangnya jaman, study media makin beragam. Ada yang membahas mengenai kesadaran masyarakat yang makin menjalar tentang urgensi dunia maya. Ada juga yang menjelaskan soal bagaimana pemanfaatan

media digital untuk banyak keperluan. Termasuk, optimalisasi media digital demi kepentingan publik melalui kebijakan pemerintah (Rachman, 2019). Hal itu disebabkan eksistensi era *cyber culter* yang sudah tidak dapat dihindarkan (Purwanto & Nuha, 2020).

Menurut Effendy (2003), film merupakan salah satu media komunikasi massa yang menyampaikan pesan melalui gambar bergerak dan suara kepada khalayak luas. Film juga dapat diartikan sebagai sebuah karya seni yang berupa media audiovisual. Film membutuhkan naskah, actor, sutradara dan beberapa peran penting di dalam tim produksi film diantaranya juru kamera, penyunting gambar, penata lampu, artis, aransemen musik, hingga penulis skenario. Film memiliki potensi yang cukup untuk mempengaruhi penontonnya, tidak hanya untuk hiburan penonton tetapi juga pemikiran ideologis pembuat film. Mengangkat isu sosial, ekonomi, politik dan sejarah merupakan ide cerita yang sering digunakan dalam film karena dapat menarik penonton untuk menonton film tersebut. Ketertarikan masyarakat untuk menonton film lebih disebabkan karena masyarakat lebih mudah memahami isi pesan dengan menonton film.

Pesan dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis dan dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan. Setiap karya sastra, baik itu berupa film atau bentuk karya sastra lainnya masing-masing mengandung dan menawarkan pesan moral di dalam alur ceritanya. Jenis atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan bergantung pada keyakinan, keinginan dan *interest* pengarang atau pencipta yang bersangkutan.

Maka dapat dikatakan bahwa film juga mampu mengajarkan moral komunikasi lewat pesan moral yang disampaikan film tersebut melalui cerita yang terjadi di dalamnya (Manalu & Warsana, 2021).

Film penuh dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang beraneka macam dandan penuh kontestasi. Sosial media kerap dijadikan alat dominasi untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadiran gagasan tertentu (Rachman, 2020)). Film menyebabkan penonton untuk dapat memaknai apa yang disampaikan pembuatnya. Di sisi lain, kerap ada representasi-representasi dari entitas di dalam film *dirty vote*, yang di mana film tersebut menjadi lekat dengan ilmu komunikasi. Ada bahasa yang disampaikan, baik verbal maupun non-verbal. Verbal dapat melalui dialog dan non-verbal melalui aksi atau gerakan.

Representasi dalam film merupakan hal yang sering bersinggungan dengan masyarakat. Mengingat, film telah menjadi salah satu hiburan yang digemari. Disisi lain, film memiliki sejumlah fungsi, diantaranya untuk menggerakkan opini publik. Sehingga, mempelajari tentang film merupakan salah satu upaya yang bersandingan dengan publik. Tujuan representasi dalam film ialah menjelaskan cara untuk mengerti pesan-pesan yang disampaikan melalui film sebagai media komunikasi audio visual.

Dalam konteks media, representasi seringkali menjadi subjek penting karena mempengaruhi cara pandang atau pemahaman dunia dan orang-orang disekitar mereka. Representasi yang akurat dan beragam dapat membantu

untuk menghindari stereotip dan prasangka, sedangkan representasi yang tidak akurat dapat memperkuat stigma dan ketidakadilan sosial.

Film dokumenter sebagai media komunikasi audio visual saat ini menarik untuk diperbincangkan, selain menyuguhkan sisi hiburan, film dokumenter juga mempertontonkan fakta atau realitas sosial yang dapat dijadikan media kritik sosial. Salah satunya adalah film dokumenter Dirty Vote. Film menjadi alat komunikasi karena film tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi. Seiring berkembangnya jaman kebangkitan film saat ini bermunculan film-film yang menyajikan seks, kriminalitas, dan kekerasan. faktor itulah yang membuat film menjadi bagian dari alat propaganda bagi kepentingan sebuah negara untuk menyebarkan ideologi, memunculkan pergerakan sosial, memperlihatkan akibat dari penyimpangan kekuasaan, serta dapat memunculkan realitas sosial yang jarang terlihat dalam kehidupan masyarakat.

Munculnya Film dokumenter Dirty vote pada masa tenang kampanye politik, yang di dalamnya memuat obrolan hangat di masa tenang kampanye politik, film tersebut mengungkapkan potensi kecurangan dalam pemilu 2024 dan memancing reaksi beragam dari berbagai pihak, dari masyarakat umum, politisi, dan pakar hukum. di dalam film dirty vote yang berdurasi 117 menit atau 1 jam 57,21 detik. Banyak hal yang dibicarakan, seperti syarat menang satu putaran pilpres 2024, film dokumenter ini di sutradarai Dandhy Dwi Laksono.



Gambar 1.1 Film Dokumenter *Dirty Vote*

Bintang dalam film dokumenter *Dirty Vote* ada tiga ahli pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti seorang akademis, pakar hukum tata negara dan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Pakar selanjutnya Feri Amsari pakar hukum tata negara, aktivis hukum, dosen, dan akademisi Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan terakhir Zainal Arifin Mochtar, merupakan seorang dosen, akademisi, pakar Hukum Tata Negara Indonesia, serta aktivis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Film *dirty vote* juga menyinggung beberapa pejabat pemerintah republik Indonesia dan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, di antaranya presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Menurut Profesor Masduki, pakar ilmu komunikasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, menilai bahwa film dirty vote memberi informasi penting tentang pemilihan umum yang selama ini luput diberitakan media massa, terutama media penyiaran public yang dibiayai anggaran negara, seperti TVRI.

Di dalam film dokumenter dirty vote menggali tentang kecurangan dari setiap pasangan calon pemilihan umum presiden 2024. Bantuan Sosial menjelang Pemilihan umum 2024 menjadi salah satu topik yang dibahas, lalu membahas pernyataan kontroversial Presiden Jokowi, dan membahas terkait potensi kecurangan perangkat desa. Kritik tajam lebih banyak ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sehingga Tim kampanye dari nomor urut 2 menuding bahwa para pembuat film dokumenter Dirty Vote telah melakukan fitnah.

Dhandy Dwi Laksono sebagai sutradara mempertahankan gaya sinematik provokatifnya, membuat film ini bukan hanya sekedar tontonan sepintas berita saja, tetapi juga menjadi pemicu pembicaraan sosial di masyarakat Indonesia, di tengah masa tenang kampanye. Para ahli hukum tata negara di dalam filmnya memberikan dimensi keilmuan masing-masing, yang mana memberikan bobot pada argumen yang di rujuk dalam film.

Pandangan Tiyo selaku jurnalis tv terhadap film dokumenter Dirty Vote, film Dirty Vote dikatakan berhasil mengungkap kebobrokan system pemilu yang berindikasi merusak tatanan demokrasi. Ditambah adanya analisis

hukum tata negara juga memberikan sudut pandang yang kritis terhadap indikasi kecurangan pemilu khususnya pada tahun 2024. Film ini juga mengajak masyarakat akan bijak terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya mengenai bantuan sosial yang tepat sasaran atau kewajiban terhadap warga miskin, bukan sebagai alat politik atau kepentingan pejabat. Film ini muncul disaat menjelang pemilu beberapa hari, seakan akan berindikasi menjadi balck campaign salah satu paslon.

Dan lagi menurut Bagas selaku jurnalis The Jakarta Post. Film “Dirty Vote” menyajikan sebuah narasi yang menyoroti berbagai dinamika dan kontroversi seputar politik dan pemilihan umum. Dari sudut pandang saya pembuatan film ini, adalah ada beberapa aspek yang layak untuk dipertimbangkan dari Plot atau Cerita, Karakter dan Akting, Pengembangan tema, kualitas produksi, dan terakhir penerimaan dan dampak.

Jadi secara keseluruhan, Film “Dirty Vote” merupakan film yang menarik dan relevan, tapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengembangan karakter dan pengelolaan tema. Dengan penyesuaian tersebut, film ini berpotensi menjadi karya yang lebih berdampak dan mendalam dalam menggambarkan realitas politik.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana representasi kritik sosial kecurangan pemilihan umum 2024 dalam film dokumenter *dirty vote*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi kritik sosial kecurangan pemilihan umum 2024 dalam film dokumenter *dirty vote*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, memperoleh beberapa manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi serta pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan manfaat sebagai bahan atau sumber bacaan bagi studi ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktik

Hasil penelitian di harapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat indonesia dan sebagai edukasi yang dapat memberikan contoh demokrasi yang adil dalam pemilihan umum di Indonesia melalui film dokumenter yaitu *Dirty Vote*.